

The Political Career of Maria Ullfah 1934-1947

Masroka¹, Siti Masykuroh², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

masrokaa@gmail.com¹, sitimasykuroh@radenintan.ac.id²,

hasanah@radenintan.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the political career of Maria Ullfah from 1934 to 1947, as well as the influence of her family and education on the formation of her political consciousness. Born into an educated priyayi family, Maria Ullfah had access to extensive formal education from an early age, eventually pursuing legal studies at Leiden University in the Netherlands. Growing up in a family environment closely connected to intellectual traditions and the colonial bureaucracy, combined with her experiences witnessing injustices against women, nurtured her social sensitivity and early commitment to gender equality. Her Western education and interactions with figures of the national movement, such as Sutan Sjahrir, further strengthened her awareness as part of a colonized nation in need of change. Upon returning to Indonesia, she actively participated in women's organizations, educational institutions, and the national movement, playing a key role in the Indonesian Women's Congress, KOWANI, and literacy eradication efforts. During the revolutionary period, her intellectual capacity and dedication led to her being appointed a member of the BPUPKI and later becoming the first female Minister of Social Affairs. Her contributions not only opened public spaces for women but also played a significant role in the political processes leading to the establishment of the Indonesian state. This study demonstrates that family background, education, and personal experiences were significant factors in shaping Maria Ullfah as a central figure in the women's movement and the struggle for independence.

Keywords : *Maria Ullfah, Political Consciousness, Women's Movement, Emancipation.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perjalanan Karier politik Maria Ullfah 1934-1947 serta pengaruh keluarga dan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran politiknya. Terlahir dari keluarga priyayi terdidik, Maria Ullfah memperoleh kesempatan pendidikan formal yang luas sejak kecil hingga menempuh studi hukum di Universitas Leiden Belanda. Lingkungan keluarga yang dekat dengan tradisi intelektual dan birokrasi kolonial, disertai pengalaman menyaksikan ketidakadilan terhadap perempuan, menumbuhkan sensitivitas sosial dan komitmen awalnya pada isu kesetaraan gender. Pendidikan Barat dan interaksinya dengan tokoh pergerakan nasional seperti Sutan Sjahrir memperkuat kesadarannya sebagai bagian dari bangsa terjajah yang membutuhkan perubahan. Sekembalinya ke Indonesia, ia aktif dalam organisasi perempuan, lembaga pendidikan, dan gerakan nasional, serta memainkan peran penting dalam Kongres Perempuan Indonesia, KOWANI, dan upaya pemberantasan buta huruf. Pada masa revolusi, kapasitas intelektual dan dedikasinya membuatnya dipercaya menjadi anggota BPUPKI dan kemudian Menteri Sosial pertama dari kalangan perempuan. Kontribusinya tidak hanya membuka ruang publik bagi perempuan, tetapi juga berperan dalam proses politik menuju lahirnya negara Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa latar keluarga, pendidikan, dan pengalaman personal berperan signifikan dalam membentuk Maria Ullfah sebagai tokoh sentral gerakan perempuan dan perjuangan kemerdekaan.

Kata kunci : *Maria Ullfah, Kesadaran Politik, Gerakan Perempuan, Emansipasi.*

PENDAHULUAN

Perjalanan politik perempuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks kolonialisme dan perjuangan menuju kemerdekaan. Pada masa tersebut, ruang gerak perempuan dibatasi oleh struktur sosial patriarkal serta kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial, sehingga perempuan pribumi mengalami marginalisasi ganda: subordinasi oleh dominasi laki-laki dan penindasan oleh kekuasaan penjajah. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kondisi historis kolonialisme hampir sepenuhnya menutup peluang bagi perempuan untuk berperan secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan publik dan perjuangan nasionalisme. Di tengah masyarakat yang masih patriarkal, pendidikan menjadi jalan penting bagi perempuan untuk keluar dari pembatasan peran domestik dan mulai memasuki ranah publik, termasuk organisasi sosial, profesi modern, dan pergerakan nasional. bahwa Ketika itu konteks sejarah kolonialisme memang hampir-hampir menutup celah bagi perempuan untuk berperan dalam banyak kehidupan perjuangan nasionalisme (Arif Subekti, 2021, hlm 184).

Dalam situasi masyarakat yang masih menganut sistem patriarkal, keterbatasan ruang gerak perempuan justru melahirkan embrio kesadaran politik perempuan yang terwujud melalui organisasi pendidikan, pergerakan sosial, hingga kongres perempuan pertama tahun 1928. Salah satu wanita terpelajar yang berpengaruh membawa perubahan adalah Maria Ullfah. Dilihat pada awal abad ke-20, dinamika Sosial politik Hindia Belanda mengalami perubahan signifikan akibat berkembangnya politik etis, meningkatnya akses pendidikan bagi pribumi, serta bangkitnya nasionalisme di berbagai wilayah Asia. Kondisi ini membuka ruang baru bagi terbentuknya kelompok intelektual Indonesia, yang mulai menyadari ketidakadilan struktural dalam masyarakat kolonial. Eksistensi wanita Indonesia dalam menentukan sejarah bangsa mengalami pasang-surut. Eksistensi wanita bisa kita telaah dari mulai dari masa pendudukan bangsa Barat sampai awal kemerdekaan. Sebagai salah satu perempuan terdidik pada masa kolonial, Maria Ullfah muncul pada ruang publik yang masih didominasi laki-laki dan dibatasi oleh kebijakan kolonial yang diskriminatif (Terry Irenewaty dan Winda Prasetyaning Adhi, 2016, hlm 14).

Dalam konteks tersebut, Maria Ullfah muncul sebagai salah satu perempuan terpelajar yang berperan penting dalam pergerakan perempuan dan politik nasional. Maria Ullfah merupakan salah satu tokoh pergerakan perempuan yang paling berpengaruh pada masa pergerakan nasional. Ia tumbuh dalam keluarga priyai yang terpelajar yang memberikan landasan kuat bagi intelektualnya. Sejak muda, Maria Ullfah telah menunjukkan ketertarikan pada isu-isu pendidikan, terutama yang menyangkut perempuan. Maria Ullfah merupakan perempuan pertama yang meraih gelar Meester In De Reetchen (Sarjana Hukum) dari Universitas Leiden di Belanda pada tahun 1933. Kepulangannya ketanah air, menandai awal keterlibatan dalam pergerakan. Maria Ullfah mulai bergabung dengan organisasi-organisasi perempuan seperti Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan Kongres perempuan Indonesia, dimana ia mendorong perubahan hukum

perkawinan dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Peran Maria Ullfah semakin menonjol ketika ia memasuki ranah politik nasional. Ia menjadi perempuan pertama yang menduduki Menteri Sosial Kabinet Syahrir II pada 1946. Kiprah Maria tidak terlepas dari Interaksi Maria Ulfah dengan tokoh-tokoh besar Indonesia sangat erat. Ia kerap berdiskusi dengan Sutan Sjahrir mengenai isu politik, sosial, dan pendidikan, serta dikenal dekat dengan Soekarno dan Mohammad Hatta. Kehadirannya dalam berbagai pertemuan penting menjelang dan setelah Proklamasi menunjukkan bahwa para pemimpin nasional menaruh kepercayaan besar pada kemampuan dan integritasnya. Hal ini menegaskan posisi Maria Ulfah sebagai salah satu figur penting dalam lingkaran intelektual dan politik Indonesia pada masa itu memperjuangkan perbaikan kedudukan perempuan Indonesia melalui partisipasi aktif di dunia politik (Hestirani, 2020, hlm 125).

Kisah Maria Ullfah menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka ruang publik bagi perempuan. Pembahasan mengenai Karier Politik Maria Ullfah periode 1934-1947 tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial politik Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tingkat partisipasi politik perempuan masih rendah (Selvia Adriani, 2024, hlm 131). Masih dipengaruhi oleh Budaya patriarki dan pandangan tradisional yang merendahkan peran perempuan dalam politik menyebabkan eksistensi perempuan dalam menentukan arah sejarah bangsa mengalami pasang surut. Dengan kehadiran Maria Ullfah, membawa wanita kepada perubahan.

Pada hakikatnya, wanita memiliki peran yang multidimensi sekaligus juga melekat dalam dirinya. Pengalaman pendidikannya yang sampai keluar negeri, menjadikannya wanita terpendang sejak kepulangannya serta profesi mengantarkannya pada karier politik. Perjalannya setelah kepulangannya mengenyam pendidikan di Belanda, dimulai dari bekerja sebagai tenaga honorer, mengajar disekolah Muhammadiyah, Ketua Biro Konsultasi Perkawinan BKP, aktif di Organisasi istri, aktif di Kongres Perempuan Indonesia, hingga sampai puncaknya di Karier Politik menjadi anggota BPUPKI, dan menjadi Menteri Sosial pada Kabinet Syahrir.

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian Maria Ullfah ini penting dilakukan untuk memahami Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus dan mendalam membahas karier politik Maria Ullfah Santoso dalam rentang waktu 1934–1947 dengan menempatkannya dalam konteks dinamika sosial-politik kolonial hingga awal kemerdekaan. Alasan pengkaji meneliti kajian ini karena: 1). Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang Maria Ullfah cenderung bersifat biografis umum atau menekankan posisinya sebagai perempuan pertama yang menjabat menteri, tanpa menguraikan secara sistematis proses, strategi, serta bentuk partisipasi politiknya sebagai perempuan terdidik di tengah budaya patriarki dan struktur kolonial. Selain itu, 2). ketimpangan dalam historiografi Indonesia yang masih minim mengangkat peran politik perempuan turut menyebabkan kontribusi Maria Ullfah dalam transformasi gerakan perempuan dan politik nasional belum mendapatkan perhatian yang

memadai. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara historis dan analitis perjalanan karier politik Maria Ullfah Santoso pada periode 1934–1947.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (perbandingan), interpretasi (menelaah), dan histogriografi (penulisan Sejarah) (Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, 2018).

Tahap pertama adalah Heuristik, yaitu proses pengumpulan sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam tahap ini, penulis mengumpulkan sumber primer dan skunder. Sumber primer diperoleh dari arsip digital Delpher yang dapat diakses melalui laman web [www. Delpher. nl](http://www.Delpher.nl). berupa koran, surat dan majalah terbitan masa kolonial yang memuat informasi mengenai aktifitas Maria Ullfah rentang waktu 1934-1947. Selain itu juga penulis menggunakan arsip digital KTLV yang diakses melalui laman web digitalcollections.universiteitleiden.nl, yang berisikan tentang foto-foto terkait masa Maria Ullfah ketika masa pendidikannya. Kemudian, sumber sekunder diperoleh dari buku *Maria Ullfah Subadio: Pembela Kaumnya* karya Maria Ulfah Subadio (1985), serta artikel-artikel ilmiah yang relevan yang diakses melalui Google Books, Google Scholar, dan Publish or Perish.

Tahap kedua adalah kritik sumber yang bertujuan untuk menilai keabsahan dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, penulis melakukan kritik eksternal dengan menelaah asal usul sumber, waktu penerbitan, serta latar belakang penulis atau institusi penerbit sumber. Selanjutnya kritik internal dilakukan dengan membandingkan isi antar sumber untuk menilai objektivitas, konsistensi informasi, serta kemungkinan adanya bias pada sumber-sumber kolonial. Sumber yang tidak relevan atau informasi yang meragukan, akan dieliminasi dari penulisan.

Tahap ketiga adalah interpretasi, pada tahap ini, penulis menganalisis dan menafsirkan data serta dinamika perjalanan karier Politik Maria Ullfah dalam konteks sosial dan politik Indonesia pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan.

Tahap terakhir adalah histogriografi, penulisan kembali penyusunan hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah. Fakta-fakta yang telah melalui proses interpretasi disajikan dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis, kronologis, dan analitis. Penulisan difokuskan pada pembahasan mengenai perjalanan karier politik Maria Ulfah pada periode 1934–1947.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial-Politik Kolonial sebagai Latar Pergerakan Nasional 1930–1940-an

Kondisi sosial-politik Indonesia pada dekade 1930-1940-an menjadi latar belakang yang sangat penting berkembangnya pergerakan nasional Indonesia. Pada masa ini, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan yang semakin refresif

sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran nasional rakyat Indonesia. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk sehingga memicu ketidakpuasan rakyat sosial. Disisi lain, mulai berkembangnya paham nasionalisme ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan perempuan, serta aktivitas kaum intelektual setelah sumpah pemuda 1928. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, perempuan sudah ikut ambil bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan mereka tidak hanya sebagai pendukung di belakang layar, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang turut membantu membangun rasa kebangsaan dan identitas nasional yang kuat. Perempuan tidak hanya menjadi bagian pasif dari peristiwa besar ini, melainkan ikut mengambil peran nyata sebagai pelaku perubahan (Elsa Manora Simaremare, 2025, hlm 307). Hal ini membuat was-was kolonial karena dianggap sebagai ancaman serius bagi kekuasaannya. Untuk meredam pergerakan tersebut, pemerintah membubarkan partai-partai nasional, dan menangkap dan mengasingkan tokoh-tokoh pergerakan. Akibat dari kebijakan refresif ini, ruang gerak politik semakin menyempit. Sehingga perjuangan nasional Indonesia banyak beralih ke jalur pendidikan dan jalur intelektual termasuk kesempatan diberikan kepada kaum perempuan.

Pada permulaan abad ke 20, telah mulai bangkit semangat nasionalisme dikalangan bangsa-bangsa Asia, yang terangsang oleh kemenangan Jepang atas negara Rusia dalam pertempuran yang terkenal di Port Arthur pada 1905. Waktu itu muncul kegelisahan dimana-mana, yang dicoba oleh Belanda dengan jalan mengambil hati orang Indonesia. Disamping itu, pemerintah Hindia Belanda sudah menjalankan politik etis sejak 1901, mereka memberikan pendidikan kepada orang-orang Indonesia yang terseleksi. Anak dari keluarga golongan atas diberi kesempatan untuk mengecap pendidikan terbaik dalam lingkungan sekolah-sekolah Belanda sampai ke Eropa. Harapan mereka, agar kepandaian yang telah diperoleh anak-anak ini dapat membantu dan penunjang kekuasaan Belanda atas rakyat Indonesia (Gadis Rasyid, 1985, hlm 12). Politik etis ini diberlakukan menuntun Indonesia kearah kemajuan, tetapi tidak lepas dari kepentingan dan naungan dibawah kolonial Belanda (Susilo, 2018, hlm 407). Pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan formal merupakan satu hal yang penting bagi perempuan Indonesia. Sejak 1893, minat perempuan mengikuti pendidikan formal meningkat melalui kweekschool yang didirikan pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah dasar. Pada 1920, pemerintah mereformasi sekolah guru dan memberi peluang lebih besar bagi perempuan, seiring bertambahnya jumlah sekolah khusus perempuan. Kurikulumnya mencakup bahasa Belanda, mendongeng, seni, permainan, kerajinan, pengetahuan alam, kesehatan, kebersihan, metode mengajar, sejarah, geografi, dan menulis (Suwigyo, 2012, hlm 97). Setelah diterapkan politik etis pada awal abad 20, lambat laun semakin banyak sekolah formal yang didirikan di Hindia Belanda, dampak dari adanya kebijakan politik etis ini adalah melahirkan para intelektual yang akhirnya akan menyadari bahwa bangsanya sedang dalam penjajahan dan menginginkan perubahan (Shelita Bunga Apriyana, 2022, hlm 22).

Ayah Maria Ullfah, diberi kesempatan untuk bersekolah di sekolah menengah Belanda (Hogore Burger School), kemudian setelah itu mendapatkan didikan kepomong prajaan. Ibunya, mendapatkan pendidikan formal yang masih jarang didapatkan dikeluarga Indonesia. Saudara Ibunya yang tertua, Achmad Djajadiningrat pernah menjabat sebagai anggota Raad Van Indie, semacam dewan pertimbangan agung. Sepupu Maria, Didi Djajadiningrat, waktu kemerdekaan menjadi duta besar RI di Moskow. Pamannya, Prof Hoesein Djajadiningrat, ahli islam pertama di Indonesia, dan pamannya yang lain Loekman Djajadiningrat, ketika perang dunia ke-II menjadi penasihat pemerintah pelarian Belanda yang berkedudukan di London.

Lingkungan keluarganya yang berpendidikan, dengan tradisi intelektual yang kuat dan keterlibatan langsung dengan politik kolonial maupun awal kemerdekaan, menjadi salah satu faktor penting yang membentuk cara pandang kritis dan kesadaran politik Maria Ullfah sejak muda. Namun karena terbatasnya akses pendidikan yang tersedia bagi perempuan pada masa itu, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tidak banyak perempuan yang dapat mengembangkan kesadaran pendidikan seperti yang dimiliki Maria Ullfah. Berkat pendidikannya itulah, Maria Ullfah menjadi orang besar.

Biografi Singkat dan Awal Karier Politik Maria Ulfah (1934–1942)

Maria Ullfah merupakan seorang putri dari seorang Bupati Kuningan Raden Adipati Arya Mohammad Ahmad dan R.A Hadidjah Djajadiningrat. Maria lahir di Serang, 18 Agustus 1911 (YPR.Achmad, 2023, hlm 4). Maria merupakan putri kedua dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan yang begitu sangat peduli untuk mengedepankan pendidikan. Adiknya bernama Iwanah dan Hatnan, sedangkan kakak pertamanya meninggal ketika masih kecil. Maria adalah ejaan barat untuk Mariam nama ibunda nabi Isa. Mestinya namanya Mariam Ullfah, tetapi karena kurang enak untuk didengarnya, maka ayahnya memakai ejaan barat, menjadi Maria Ullfah dan sehari-harinya biasa dipanggil Itje (MPB. Manus dkk, 1993, hlm 109). Keluarganya termasuk keluarga dari golongan atas atau juga disebut priyai dalam masyarakat kala itu. Sebagai putri dari keluarga bangsawan, Maria Ullfah memperoleh gelar Raden Ajeng. Namun, sejak usia muda, ia lebih menghargai prestasi intelektual daripada status sosial. Gelar Meester in de Rechten (Tuan), yang kemudian ia peroleh di Universitas Leiden, jauh lebih membanggakan baginya daripada gelar bangsawan. Sikap rendah hati dan progresif ini tidak dapat dipisahkan dari didikan ayahnya, yang membebaskan anak-anaknya untuk memilih pendidikan tanpa memandang jenis kelamin. Dalam tulisannya, Maria Ulfah pernah mengatakan bahwa ayahnya memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara setara, bahkan mendorong ketiganya untuk mengejar pendidikan tinggi, termasuk di luar negeri. R.A.A Achmad juga menolak praktik poligami yang lazim di kalangan priyai pada zamannya, lebih memilih kehidupan rumah tangga yang sederhana dan egaliter (Arsip Nasional Republik Indonesia, 1983).



Foto keluarga: Dari kiri ke kanan; Iwanah, R.A. Hadidjah Djajadiningrat, R.A.A
Mohammad Achmad, Hatnan dan Maria Ullfah.

(Sumber photo: Buku Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya 1985, hlm 17)

Hal pertama yang menyadarkan Maria Ullfah tentang rendahnya kedudukan perempuan terjadi saat ia berlibur di rumah kakek-neneknya dan melihat bibinya, R.A. Soenwanda, yang diceraikan karena tidak memiliki keturunan, lalu dikucilkan dan dianggap sebagai aib keluarga. Pada masa itu, perceraian selalu dipersalahkan pada perempuan, sementara perempuan kalangan atas belum memiliki pendidikan dan kemandirian untuk menentukan hidupnya sendiri. Pengalaman melihat penderitaan bibinya meninggalkan kesan mendalam dan menjadi bibit awal tumbuhnya kesadaran, serta tekad Maria untuk memperjuangkan martabat perempuan (Gadis Rasyid, 1985, hlm 8).

Namun dalam praktiknya penduduk pribumi masih terbagi menjadi golongan priyayi dan golongan pribumi biasa, perbedaan itu terjadi menurut golongan masyarakat dan status sosial. Selanjutnya perbedaan tersebut dipertegas dengan adanya penggunaan bahasa pengantar yaitu bahasa Belanda contohnya adalah Eerste Klasse School atau sekolah kelas satu dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya untuk golongan Eropa dan elite pribumi, sedangkan bahasa Melayu untuk golongan pribumi biasa (Alifia Nurhusna Afandi dkk, 2020, hlm 22). Ketika pertama kali keluarganya pindah ke ke Jakarta, Maria Ullfah memulai pendidikannya pada tahun 1916 ketika ia masuk sekolah Eerste (ES) di Batavia yang kemudian berganti nama menjadi sekolah Hollands Inlandsche (HIS) Sekolah ini ditunjukkan untuk anak-anak bumiputera elit dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar (Fazriani Putri Utami, Fatiyah, 2025, hlm 131). Dilanjutkan pada 1917, dengan masuk sekolah dasar jalan Cikini, yang sekarang terletak di SMP. I. Kemudian pindah di sekolah SD Willemslaan, yang sekarang bernama jalan Perwira. Gedungnya sekarang terletak di Masjid Istiqlal, diseberang kantor pusat Pertamina. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Maria Ullfah

melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Batavia, yang setara dengan sekolah menengah pertama pada masa kolonial. Saat Maria duduk di sekolah menengah, ia menyaksikan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang menyatakan “Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa,” dan hal itu sangat menyentuh hatinya. Namun, kesadaran penuh akan nasib bangsanya sebagai bangsa terjajah baru muncul ketika ia menuntut Ilmu Hukum di Leiden, Belanda. Kemudian Maria meneruskan pendidikannya ke AMS (Algemeene Middelbare School) yang setara dengan sekolah menengah atas, disini kemampuan akademiknya semakin menonjol.

Maria Ullfah menikah di Cirebon pada 28 Februari 1938 dengan R. Santoso Wirodihardjo S.H. Sejak saat itulah, Nama Maria Ullfah menjadi Maria Ullfah Santoso karena Dalam tradisi masa itu, cukup umum bagi perempuan Indonesia terpelajar untuk menambahkan nama suami sebagai bentuk identitas sosial, terutama di kalangan birokrat, politikus, atau tokoh publik. Dan Maria menjadi satu-satunya wanita yang perlu meminta izin kepada negara untuk menikah (Yakutati Ismatillah L., 2018, hlm 19).



DI KOENINGAN — Putri Bupati Koeningan,

Ibu Maria Ulfah dan Bapak Raden Santoso Wirodihardjo menikah (Arsip Daerah Nijmegen, 1938).

<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRANM02:000035284:mpeg21:p015>

Pernikahan antara Nona Maria Ullfah, putri Bupati Kuningan, dan Tuan Raden Santoso Wirodihardjo. berlangsung di Kabupaten Cirebon di kediaman bupati di Kuningan. Pengantin wanita adalah perempuan muda Pribumi pertama yang meraih gelar Magister Hukum di Leiden pada tahun 1933. Kedua mempelai mengenakan pakaian adat di tengah hamparan bunga (Sijthoff, 1938 hlm,1). Tidak banyak yang dikisahkan tentang kehidupan berumah tangga maria Ulfah dengan Santoso SH. Perkawinan mereka berakhir pada tahun 1948 dengan meninggalnya Santoso akibat tembakan tentara Belanda.



Gambar: Peserta acara peringatan 10 tahun peladjar-peladjar Indonesia di Batavia
Sumber:

Koleksi Digital <https://share.google/pe0mDUFir5dbeGtAK>

Setelah ibunya wafat pada tahun 1927, ketika itu Maria masih berusia 16 tahun, disaat Maria sekolah terakhir di MULO. Sepeninggal ibunya, Maria harus berperan menggantikan ibunya dan merawat adiknya yang masih kecil, dan ayah Maria tetap menduda sampai akhir hayatnya. Melihat ayahnya sebagai pegawai pemerintahan, dan karena ia sosoknya yang pandai berbicara, ia kerap kali menyambut dan melayani tamu-tamu resmi yang datang kerumahnya dengan penuh tanggung jawab. pada 1929, Maria masuk Universitas Leiden Jurusan Hukum. 1933, lulus sebagai sarjana Hukum (Meester In de Rechten) Univ Leiden. Sebenarnya sudah ada pada masa itu di Hindia Belanda sudah ada Fakultas Hukum "Rechtschogeschool", yang gedungnya terletak di Koningsplein (Kini Medan Merdeka Barat), gedung yang kini ditempati oleh Departemen Hankam, disebelah Museum Pusat. Wanita Indonesia pertama yang berkuliah disini adalah Sitti Tarunomihardjo, namun tidak menyelesaikan masa studinya. Alasan Maria memilih untuk Berkuliah keluar negeri dan mengambil jurusan Hukum pun, karena ikut ayahnya pindah karena mendapatkan tugas dari pemerintah Hindia Belanda untuk mempelajari masalah perkoperasian. Maria Ullfah menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri di Indonesia. Pendidikan yang ia dapatkan, termasuk dari luar negeri, memperluas wawasannya tentang hak-hak perempuan dan pentingnya partisipasi perempuan dalam ruang publik (Hanna Noviana, 2025, hlm 34-35). Sebagai intelektual, Maria tidak hanya menekankan pendidikan formal, tetapi juga aktif di berbagai organisasi sosial dan politik untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka.

Pada awal abad ke-20, perempuan Indonesia masih merasa bahwa partisipasi politik termasuk dalam hal hak pilih merupakan wilayah laki-laki. Namun pada dekade 1930-an, pandangan perempuan Indonesia mulai berubah. Sejak saat itulah muncul tokoh-tokoh perempuan generasi baru seperti Maria Ullfah. Ia melihat bahwa hak pilih dan keterwakilan perempuan Indonesia di dewan perwakilan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pergerakan perempuan Indonesia (Hestirani, 2020 hlm 7). Pada 1930-an, ia terlibat dalam organisasi seperti Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan Kongres Perempuan Indonesia,

dan di tengah masyarakat yang masih patriarkal, kehadirannya menjadi simbol harapan. Ia mendorong perempuan untuk tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik.



Ujian Doktor Soedjono Djoened Poesponegoro di Leiden

Sumber:

Koleksi Digital <https://share.google/E0FR7o9HG2r5pYjYT> (Anon, 1930)

Selama di Negeri Belanda Maria banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lain Haji Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan lain-lain, tetapi orang yang paling banyak mempengaruhi pikirannya serta membimbingnya ke arah kesadaran kebangsaan ialah Sutan Sjahrir. Maria sering diajak Sjahrir ke pertemuan-pertemuan politik, antara lain ke pertemuan politik "Liga Anti Kolonialisme". Di samping itu Sjahrir juga memberi bermacam-macam buku bacaan politik. Di bidang-bidang lain pun Sjahrir ikut menjadi pembimbing perkembangan jiwa Maria Ullfah. Di Negeri Belanda, kepada Sjahrir Maria mengungkapkan keinginannya, bahwa sekembalinya di tanah air ia akan menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memajukan rakyatnya, khususnya kaum wanita yang masih kurang pendidikannya (MPB. Manus dkk, 1933, hlm 111).

Setelah menyelesaikan masa studinya, Maria Ullfah Kembali ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, Maria Ullfah memutuskan untuk istirahat sementara waktu, dan melepaskan kerinduan kepada sang ayahnya yang ketika itu masih menjabat sebagai bupati Kuningan. Untuk mengisi waktu luang sembari mengurus ayahnya, Maria Ullfah memutuskan untuk menerima tawaran bekerja sebagai tenaga honorer selama enam bulan di kantor Kabupaten Cirebon (Mohamad Cholid, 1988, hlm 109).

Bekerja di Kantor Kabupaten Cirebon Sebagai Tenaga Honorer

Berdasarkan Surat Keputusan No. 153 tanggal 20 Desember 1933, Raden Adjeng Maria Ullfah, putri Raden Moechamad Achmad dari Kuningan, diangkat sebagai pegawai sementara pada kantor kerajaan di Cirebon untuk jangka waktu tiga bulan, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di luar jadwal kepegawaian reguler sambil menunggu persetujuan dewan Kabupaten Cirebon. Dalam jabatan tersebut, ia ditempatkan di kantor kabupaten dan menerima tunjangan bulanan sebesar 200 gulden (Hallerman, 1934, hlm 3).

Pada tahun 1934, Maria Ulfah bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Kabupaten Cirebon selama enam bulan dengan tugas menyusun naskah peraturan

lalu lintas (*Wegverkeersordonantie*). Namun Maria merasa bidang keilmuannya tidak cocok dengan pekerjaannya, alasannya adalah karena pekerjaan itu tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Artinya cita-cita untuk memajukan kedudukan perempuan belum terlaksana, sehingga membuatnya tidak betah. Selama bekerja di Cirebon itulah, Maria kembali bertemu dengan Sjahrir setelah pertemuan terakhir di Belanda (Saputra, 2025, hlm 47).

Pengajar Sekolah di Muhammadiyah dan Perguruan Rakyat (pemberantasan buta huruf) Tahun 1934-1942

Setelah tidak lagi bekerja di Cirebon, Maria Ullfah mendapat ajakan dari temannya semasa kuliah di Belanda, Soegiarti, untuk menjadi guru di Sekolah Menengah Muhammadiyah di Batavia. Saat itu, sekolah yang berlokasi di Jalan Kramat tersebut dipimpin oleh Ir. Djuanda yang sedang membutuhkan tambahan tenaga pengajar, sehingga Maria Ullfah pun menerima tawaran tersebut dan mulai mengajar di sana. Setelah Maria selesai bekerja di kantor Cirebon, Maria pindah ke Jakarta untuk mengajar Bahasa Jerman, Sejarah, dan Tata Negara. Disekolah Muhammadiyah selain belajar tentang pelajaran umum, juga menyatukan pengajaran dan pendidikan agama islam untuk anak didik mereka. Selain itu, sekolah ini juga bersifat nasionalis yang anti kolonial, sehingga pemerintah Hindia Belanda menanamkan sekolah Muhammadiyah sebagai *wilde scholen* atau sekolah liar.



Maria Ullfah pernah menjadi guru di sebuah sekolah menengah swasta yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dalam sebuah foto, terlihat para siswa dan guru berpose bersama, dengan Maria Ullfah berdiri di tengah sebagai salah satu pengajarnya.

Sumber: (Gadis Rasyid, 1985, hlm 46).

Maria Ullfah juga mengajar di sekolah menengah "Perguruan Rakyat" yang didirikan oleh mahasiswa aktivis sekaligus para pejuang kemerdekaan. Dalam melaksanakan pengajaran dan pendidikan Perguruan Rakyat berpedoman kepada "Sendi-sendi Perguruan Rakyat". Pertama-tama ialah dasar kebangsaan Indonesia, yang menyatukan dunia pemuda dengan dunia yang lebih besar, yaitu masyarakat yang bersemangat dan insaf tentang kebangsaan Indonesia. Maria Ullfah, yang merupakan ahli hukum pribumi pertama, bekerja di Sekolah Menengah Pertama

Muhammadiyah bersama Soegiarti, seorang kepala sekolah yang pernah menempuh pendidikan di Deventer. Dalam catatan sejarah disebutkan juga pernah suatu ketika, pada masa liburan sekolah mengadakan perjalanan ke sebuah desa di pegunungan Sukabumi, tempat para guru dan siswa menginap di sebuah rumah kedatangan. Di lain waktu, sekolah tersebut berangkat ke Banten. Putri-putri bupati dan patih (pejabat tertinggi dalam lingkungan pemerintahan adat) masih bekerja di sekolah-sekolah. Sebagian besar adalah guru (Saint Melania WerkNijmegen, 1936, hlm 97).

Menjadi guru disekolah menengah patrikelir yang bercorak seperti seperti perguruan rakyat dengan gaji yang minim, bahkan tidak dibayar karena minimnya dana, tetapi Maria memilih bekerja semata-mata sebagai wahana untuk bergaul dan bergerak bersama-sama pejuang nasionalis Indonesia lainnya seperti Amir Sjarifuddin, Moh. Jamin, dr. Adnan Kapau Gani dll (Gadis Rasyid, 1985, hlm 39).

Aktif di Kongres Perempuan Indonesia 1938 dan Mulai Terlibat di KOWANI

Gerakan emansipasi perempuan Indonesia mulai tumbuh sejak awal abad ke-20 melalui tokoh-tokoh pelopor seperti RA Kartini dan Dewi Sartika yang memperjuangkan akses pendidikan bagi perempuan. Upaya mereka membuka jalan bagi berdirinya sekolah-sekolah khusus perempuan, meskipun jumlahnya masih minim dan belum merata di berbagai daerah. Memasuki tahun 1928, mulai muncul kesadaran di kalangan perempuan untuk terlibat dalam pergerakan nasional. Ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perempuan, salah satunya Poeteri Mahardika, sebagai organisasi awal yang mengakomodasi aspirasi perempuan dalam perjuangan kebangsaan (Hanna Noviana, 2025, hlm 32).

Kemudian muncullah Kowani berawal dari pembentukan Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), yang dibentuk melalui Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22–25 Desember 1928. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah awal untuk menyatukan berbagai organisasi perempuan di Nusantara dan menjadi landasan bagi lahirnya gerakan perempuan yang lebih terorganisasi, serta memperkuat perjuangan mereka dalam memperoleh hak, kesempatan, dan kedudukan yang setara dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam perkembangan selanjutnya, Batavia menjadi pusat aktivitas kaum intelektual pribumi. Di kota inilah sejumlah tokoh terkemuka menggagas pendirian Pusat Pengembangan Kebudayaan yang kelak dikenal sebagai "AID". Sebuah komite dibentuk untuk merealisasikan gagasan-gagasan tersebut, yang terdiri dari Dr. Poerbatjaraka, Mohammad Yamin, Amir Sjarifoeddin, Sanoesi Pane, Dr. Soebroto, dan Maria Ullfah. Kehadiran Maria Ullfah dalam komite ini menunjukkan bahwa perempuan mulai memperoleh ruang dalam ranah intelektual dan politik. Pada tanggal 13, para anggota komite mengadakan pertemuan di rumah Dr. Poerbatjaraka untuk membahas metode kerja dan menetapkan susunan dewan definitif (Jurnal Perdagangan Untuk Hindia Belanda, 1936, p. 1).

Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh KOWANI adalah mengadakan kongres perempuan yang pertama di Jakarta pada tahun 1935. Dalam kongres tersebut, Maria Ullfah memberikan pidato yang menginspirasi, menekankan

pentingnya pendidikan dan kesadaran politik di kalangan perempuan. Ia mendorong perempuan untuk tidak hanya terlibat dalam urusan domestik, tetapi juga aktif dalam politik dan sosial. Menurut laporan dari kongres tersebut, lebih dari 500 perempuan dari seluruh Indonesia hadir, menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Pada 1938, Kongres Perempuan Indonesia akan diselenggarakan pada bulan Juli. Tujuan kongres adalah membahas berbagai isu dan kepentingan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan peran dan pekerjaan mereka dalam masyarakat. Oleh karena itu, seluruh perempuan di Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Dalam kongres tersebut, beberapa pokok bahasan yang akan dibicarakan meliputi:

1. Kedudukan hukum perempuan pekerja, disampaikan oleh Ibu Siti Soendari.
2. Kedudukan perempuan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, disampaikan oleh Ibu Maria Ullfah.
3. Prostitusi di Indonesia, dibahas oleh Ibu Roemesari.
4. Hak pilih perempuan (The People's Daily: Surat Kabar Harian Untuk Belanda, 1938, hlm1).

Kongres Perempuan Adat Ketiga akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 23–28 Juli. Kongres ini akan membahas berbagai isu penting terkait kedudukan dan peran perempuan adat di Indonesia. Beberapa topik utama yang akan dipresentasikan meliputi:

- "Posisi Perempuan Adat dalam Hukum Perkawinan" oleh Maria Ullfah.
- "Hak Pilih Perempuan" oleh Datoefc Toemenggoeng.
- "Posisi Perempuan Pekerja" oleh A. Rachim.
- "Pendidikan Anak Perempuan Adat" oleh N. Roemsari.



Foto: Kongres perempuan Indonesia ke III

Sumber: (Gadis Rasyid, 1985, hlm 61).

"Suara dari Indonesia" sebuah judul dalam sejarah berisi informasi tentang Kongres Perempuan Indonesia ketiga yang diselenggarakan di Bandung dan mengutip pernyataan Maria Ullfah sebagai berikut: "Di berbagai negara kita melihat kecenderungan untuk menjadikan masalah perceraian sebagai pusat perhatian. Salah satu penyebabnya adalah di Indonesia angka perceraian jauh lebih tinggi

daripada yang menganut sistem monogami. Kecenderungan ini memang buruk, karena di sini poligami lebih umum. Hampir semua perempuan yang sudah menikah dibiarkan hidup sendiri, sehingga terpaksa mencari nafkah. Mungkinkah ini sesuai dengan Kitab Suci? Nabi kita selalu melindungi perempuan. Bukankah sudah saatnya untuk memperbaiki keadaan?" (Anon, 1938, hlm 7).

Sebanyak lima belas asosiasi perempuan adat akan menjadi anggota aktif dalam kongres ini, sementara 15 lainnya telah mendaftar untuk hadir (Institut Tropis Kerajaan (KIT), 1938, hlm 1). Maria Ullfah telah aktif dalam gerakan perempuan Indonesia sejak tahun 1930-an, termasuk melalui berbagai organisasi yang kemudian terhimpun dalam Kowani. Dedikasinya yang konsisten membuatnya dipercaya memimpin Kowani pada awal 1950-an. Yang dimana organisasi ini berkembang dan bekerja sama dengan organisasi perempuan internasional (Java-Bode: Nieuws, Handels- En Advertentieblad Voor Nederlandsch-Indie, 1955, hlm 1).

Ketua Biro Konsultasi Perkawinan BKP (1937)

Rapat dewan diadakan di Bandung pada tanggal 14 dan 21 Mei. Pertemuan anggota pada tanggal 18 Mei, ada perubahan manajemen. Disusul pertemuan anggota pada 18 Mei yang menghasilkan perubahan susunan pengurus: Nyonya W. Dommissé-v. Alphen de Veer mengundurkan diri, sedangkan Nyonya A.M. Tan-Schepers dan Tuan J.D. Hermans-Lebert diangkat menjadi anggota dewan. Sedangkan Nyonya A.M. Tan-Schepers dan Tuan J.D. Hermans-Lebert diangkat menjadi anggota dewan. Dalam pertemuan tersebut, Ibu G.H.J. Bleeker-Hendriks menyampaikan ceramah berjudul "*Anak*" yang mendapat apresiasi besar dari para anggota. Selain itu, diajukan usulan kerja sama dengan Asosiasi Ibu Rumah Tangga, NIOG, dan IEV untuk memperjuangkan penayangan lebih banyak film budaya di bioskop anak-anak. Jumlah anggota tercatat tetap stabil. Rapat Umum Tahunan Perhimpunan Isteri Priyayi Bumiputera (PIPBB) yang kedua diselenggarakan di Surabaya pada 3-6 Juni, bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Topik yang dibahas mencakup peran perempuan adat dalam berbagai dewan, representasi perempuan adat di Dewan Rakyat, serta pelatihan gadis-gadis adat sebagai perawat. Para peserta juga melakukan kunjungan ke Panti Wreda Wanita Parindra, Sekolah Tenun, dan Rumah Sakit Salvation Army untuk perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, isu mengenai perkawinan pribumi mendapat perhatian luas di Belanda, terutama terkait rancangan undang-undang yang membatasi pekerjaan bagi perempuan menikah. Meski rancangan belum diajukan ke DPR, debat telah berlangsung di kedua kamar parlemen, dengan pendapat yang saling bertentangan. Panitia Perlindungan Wanita dan Anak Pribumi kemudian mengirim surat edaran kepada berbagai organisasi perempuan adat, menegaskan bahwa kedudukan perempuan dalam perkawinan masih kurang dilindungi hukum. Panitia meminta organisasi-organisasi tersebut menyusun rancangan peraturan perkawinan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat itu, 26 perkumpulan perempuan pribumi telah tergabung, dengan Ibu Mangoensarkoro sebagai ketua dan Ibu Maria Ullfah sebagai sekretaris (Algemeen Handelsblad, 1938, hlm 2).

Kemudian didirikan sebuah asosiasi baru yang bertujuan mendukung perempuan dalam pernikahan Islam. Muncul seorang tokoh penting dalam gerakan perempuan Indonesia, Maria Ulfah, putri dari bupati pensiunan Kuningan (Jawa Barat) dan istri dari Tuan Santoso. Ia menjadi pemimpin Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan, sebuah asosiasi sosial yang memberikan bantuan kepada perempuan Indonesia dalam masalah perkawinan. Asosiasi ini didirikan di Jogjakarta pada bulan Juli 1939 (Anon, 1940, hlm 7).

Ketua Organisasi Istri Indonesia (1940-1942)

Ditengah-tengah menguatnya diskusi mengenai gerakan, para perempuan sendiri mempertanyakan, apakah benar aktivitas yang mereka lakukan sebuah gerakan ataukah hanya aktifitas biasa? Terkait hal ini, Maria Ullfah kemudian memberikan jawaban tegas bahwa apa yang dilakukan para perempuan melalui organisasi merupakan sebuah gerakan. Karena menurut Maria, gerakan perempuan merupakan wujud dari keinginan perempuan untuk mengganti keadaan lama dengan kondisi yang baru, memberikan ruang bagi perempuan secara lebih besar, sama seperti aktivitas yang sedang dilakukan oleh perempuan.

Ikatan Wanita Istri Indonesia telah menetapkan pedoman untuk enam bulan ke depan guna memerangi buta huruf dan memberikan nasihat pernikahan. Jumat malam mendatang, perkumpulan ini akan menggelar pertunjukan psiko-praktik di halaman depan gedung stasiun Senen, yang keuntungannya akan disumbangkan ke klinik anak "Istri Indonesia" dan Moehammadijah. Ketua Pengurus Utama "Istri Indonesia" saat ini adalah Ibu Maria Ullfah (Perpustakaan Kerajaan C 96, 1941, hlm 1).

Pada tahun 1940-1942, ia dipercaya menjadi ketua Organisasi Istri Indonesia (OII). Sebagai ketua Organisasi Istri, Maria Ullfah memimpin Organisasi Istri Indonesia untuk meningkatkan kesadaran perempuan, memberantas buta huruf, menggalang persatuan, dan mengadakan kegiatan sosial, sehingga menjadi wadah penting bagi perempuan Indonesia untuk berperan aktif meski dalam keterbatasan penjajahan. Perannya di OII ini juga menjadi salah satu batu loncatan bagi Maria Ullfah untuk berkiprah lebih luas, hingga akhirnya dikenal sebagai Menteri Sosial perempuan pertama di Indonesia. Dia adalah pemimpin Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan, sebuah asosiasi sosial yang memberikan bantuan kepada wanita Indonesia dalam masalah perkawinan, yang didirikan di Jogjakarta pada bulan Juli 1939. BPPIP yang dimaksud adalah lembaga sosial yang melindungi masyarakat Indonesia (Atria, 1940 hlm 5).

Peran dalam Politik Nasional (1945)

Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945

Pada bulan Februari 1944, pasukan-pasukan Amerika berhasil mengusir pihak Jepang dari Kwayalein di Kepulauan Marshall, dan serangan-serangan pengeboman terhadap Jepang dimulai pada bulan Juni. Pada bulan Juli pihak Jepang

kehilangan pangkalan angkatan laut mereka di Saipan (Kepulauan Mariana), yang mengakibatkan terjadinya krisis kabinet di Jepang. Kemudian pada bulan September, pasukan-pasukan Amerika mendarat di Morotai dekat Halmahera bagian Timur Indonesia, dan pada waktu yang sama, pesawat-pesawat Amerika mulai mengebomi Manila. Menghadapi situasi tersebut, Pemimpin administrasi militer Jepang di Indonesia, Hayashi, menganjurkan kepada pemerintah Jepang untuk memberi janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia, agar pemimpin-pemimpin Indonesia tidak berbalik melawan Jepang yang sudah melemah. Saran ini kemudian diterima oleh Perdana Menteri Koiso. Sehingga pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan ke seluruh dunia di muka sidang ke-85 parlemen Jepang, bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan dalam waktu dekat.

Pemerintah Jepang kemudian mendirikan sebuah lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Panglima Tentara Jepang, Kumaciki Harada. Pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan HUT Kaisar Jepang, Tenno Haika. Sebagai ketua terpilih dr. KRT Radjiman Wediodiningrat, Ichibangase Yoshio, dan RP Soeroso sebagai wakil ketua, dan 7 orang Jepang lainnya sebagai anggota luar biasa. Kecuali 7 orang Jepang, seluruhnya berjumlah 62 orang. 148 dua diantaranya adalah perempuan, salah satunya adalah Maria Ullfah.

Pada masa pendudukan Jepang pergerakan kaum wanita sibuk dengan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kegiatan perjuangan kemerdekaan, dan pada akhir zaman pendudukan tentara Jepang (1944--1945), Maria Ullfah bekerja pada Departemen Kehakiman dan menjadi anggota BPUPKI. Sehingga masalah Undang-undang Perkawinan tak begitu mendapat perhatian. Dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan kaum wanita telah memberikan tenaga dan fikiran secara maksimal seperti yang telah diperankan oleh Ny. Fatmawati Sukarno, Ny. Maria Ulfah Santosa, Ny. Suwarni Pringgodigdo, Ny. Artinah Syamsudin dan lain-lain. Mereka adalah kaum wanita yang mewakili wanita-wanita Indonesia yang ikut berjuang mengatasi kesulitan bangsa dan banyak hal yang mereka lakukan diantaranya dalam kesehatan, keterampilan, pendidikan, keperluan logistik dan lain sebagainya (Sondarika, 2017, hlm 215).

Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945, sidang ini membahas tentang dasar negara. yang dipimpin langsung oleh ketua BPUPKI yaitu Dr. Radjiman Widioidiningrat. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan dibentuknya Panitia Hukum Dasar, yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini beranggotakan sembilan belas orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno (Winarmo dkk, 2014). Diantara salah satunya adalah Maria Ullfah. Diakhir persidangan hari pertama dilakukan pembentukan tiga panitia kerja, pertama, panitia untuk merancang Undang-undang Dasar, kedua, panitia untuk mempelajari

hal pembelaan tanah air dan ketiga panitia untuk mempelajari hal keuangan dan perekonomian (Nana Setialaksana, 2017).

Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir (Maret 1946-Juni 1947)

Karena pihak Sekutu enggan berhubungan dengan presiden Soekarno, yang mereka anggap sebagai seorang penjahat perang karena pernah bekerja sama dengan kekuasaan militer Jepang, maka atas desakan beberapa pemimpin politik, di antaranya Nyi Mangunsarkoro diputuskan untuk merombak struktur negara. Perubahan itu adalah mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi perlementer. Sistem pemerintahan presidensial menekankan pada sentralnya peran dan fungsi presiden baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara (Dicky Eko Prasetyo, 2024, hlm 3-5).

Setelah Sutan Sjahrir diangkat menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri, ia meminta Maria Ullfah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Namun Maria menolak karena merasa tidak tepat, sebab ia masih bekerja di Kementerian Kehakiman yang saat itu dipimpin oleh Prof. Soepomo. Atas usul Maria, jabatan tersebut kemudian diberikan kepada Oetoyo Ramelan. Setelah itu, Sjahrir menawarkan posisi lain kepada Maria, yaitu sebagai pembantu pribadi dengan tugas khusus sebagai perwira penghubung antara pemerintah RI, tentara Republik, dan pasukan Sekutu yang didominasi Inggris, agar komunikasi dan koordinasi politik-militer dapat berjalan lebih efektif selama masa awal revolusi.

Surat kabar Republik Indonesia Rakyat melaporkan bahwa Menteri Sosial Republik, Ibu Maria Ullfah telah menyerahkan rancangan undang-undang kepada KNIP untuk disetujui. Berdasarkan RUU ini, mempekerjakan perempuan atau anak-anak di bawah usia 16 tahun pada malam hari akan dilarang. Taman kanak-kanak juga akan didirikan untuk anak-anak hingga usia 5 tahun (Kurir Limburg baru; Perusahaan penerbitan Limburgs Dagblad, 1946).

Sjahrir kini telah mengumumkan kabinet barunya. Wakil menteri juga telah ditunjuk untuk hampir semua menteri. Haji Agoes Salim memegang portofolio Urusan Luar Negeri, Samakidoen urusan Dalam Negeri, Dr. Sjarifoedin memegang portofolio, Dr. Soerachman adalah Menteri Keuangan, Bapak Hadi Menteri Kehakiman, Aruelji adalah Menteri Pertahanan khususnya Angkatan Laut. Kabinet Sjahrir kedua ini terdiri dari sebelas menteri dari kabinet sebelumnya. Maria Ulfah, pengacara yang pernah menempuh pendidikan di Amsterdam, memegang portofolio Urusan Sosial (Surat kabar NV Rotterdamsch, 1946).

Sjahrir sengaja memilih seorang wanita untuk jabatan ini karena diperhitungkan bahwa orang-orang Inggris akan lebih terbuka bagi pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh seorang wanita. Alasan lain ialah untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan "boneka" Jepang, sebagaimana dituduhkan oleh sementara golongan Sekutu, karena di negeri Jepang waktu itu, wanita sama sekali tidak mempunyai peranan. Mungkin juga, karena ia melihat dalam diri bekas kawannya dari negeri Belanda, sifat-sifat kepandaian berdiplomasi dan

kebijaksanaan untuk menghadapi lawan-lawan yang keras dengan sukses. Ketika Sjahrir membentuk kabinetnya kedua, Maria Ullfah diminta apakah ia bersedia menjadi anggota kabinet sebagai Menteri tanpa portefolio. Mula-mula ia menolak menerima tawaran ini. Ia ragu apakah ia sanggup mengerjakan tugas ini, tetapi Sjahrir menjawab: "Saya pun tak pernah belajar menjadi Perdana Menteri." Mendengar jawaban yang tepat ini, Maria memberanikan diri menerima tawaran ini tugasnya yang utama sebagai Menteri Sosial ialah melaksanakan seluruh proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang masih tinggal di daerah Republik Indonesia. Pemerintah Republik ingin membuktikan kepada tentara Serikat (Sekutu) bahwa hal ini dapat diurusnya sendiri. Dengan demikian tidak ada alasan bagi tentara Serikat untuk memasuki wilayah kekuasaan Republik Indonesia (Gadis Rasyid, 1985, hlm 79).

Tertulis didalam sejarah, menurut laporan Radio Djokja, pada tanggal 13 Mei, Menteri Dalam Negeri M. Roem, Menteri Keuangan Sjafoedin Prawiranegara, Menteri Sosial Maria Ullfah Santoso, Menteri Pekerjaan Umum Ir. Putahena, serta Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Soemanang berangkat dengan pesawat menuju Sumatera. Perjalanan ini bertujuan untuk menghadiri pertemuan Komite Industri Nasional Sumatera yang telah dimulai pada 12 Mei di Bukittinggi, sekaligus melaksanakan urusan masing-masing kementerian, (Institut NIOD untuk Studi Perang, Holocaust, 1947 hlm,1). Pada akhirnya Maria Ullfah berhenti sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada waktu kabinet Sjahrir ke-3 meletakkan jabatannya tanggal 26 Juni 1947 (Gadis Rasyid, 1985, hlm 105).

KESIMPULAN

Maria Ullfah tumbuh dalam keluarga priyayi terdidik yang memiliki tradisi intelektual kuat dan keterlibatan dalam birokrasi kolonial. Lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan, ditambah pengalaman melihat ketidakadilan terhadap perempuan seperti nasib bibinya yang diceraikan dan dikucilkan menjadi faktor awal yang membentuk sensitivitas sosial dan kesadaran politiknya. Pendidikan Barat yang ia terima sejak kecil hingga ke Universitas Leiden semakin memperluas wawasannya tentang hukum, hak asasi, dan kesetaraan gender. Di Leiden pula ia berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Sutan Sjahrir, yang memperkuat komitmennya untuk berjuang bagi bangsa dan perempuan Indonesia.

Sekembalinya ke tanah air, Maria aktif dalam dunia pendidikan, organisasi perempuan, dan pergerakan nasional. Ia memainkan peran penting dalam Kongres Perempuan Indonesia, KOWANI, Organisasi Istri Indonesia, serta lembaga perlindungan perempuan dalam perkawinan. Kiprahnya mengarah pada perjuangan sistematis untuk memperbaiki kedudukan hukum perempuan, memberantas buta huruf, dan mendorong partisipasi politik perempuan. Pada masa revolusi, kapasitas intelektual dan pengalamannya membuatnya dipercaya menjadi anggota BPUPKI dan kemudian menteri perempuan pertama dalam sejarah Indonesia (Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir). Melalui berbagai posisi tersebut, Maria Ullfah tidak

hanya membuka jalan bagi kaum perempuan untuk memasuki ranah publik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pembentukan landasan kebangsaan. Dengan demikian, pengaruh keluarga dan pendidikan membentuknya menjadi figur sentral dalam gerakan perempuan Indonesia dan perjuangan kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta.
- Algemeen Handelsblad*. (1938).
- Alifia Nurhusna Afandi dkk. (2020). Pendidikan Pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Artefak*, 7(1), 22. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>
- Anon. (1930). *No Tit*. 1930. <https://share.google/EOFR7o9HG2r5pYjYT>
- Anon. (1938). *De Tijd : Surat Kabar Harian Keagamaan-Politik*.
- Anon. (1940). *Perempuan dan Komunitas; majalah bulanan Asosiasi Belanda untuk Kepentingan Perempuan dan Kewarganegaraan yang Setara*. Van StockumDen Haag. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMALET01:000463001:00011>
- Arif Subekti. (2021). Tinjauan Konseptual Perempuan dan Modernitas Dalam Ruang Kolonialisme. *Jurnal Sejarah, Budaya Dan Pengajarannya*, 15(1), 184. <https://doi.org/10.17977/um020v15i12021p183>
- Arsip Daerah Nijmegen. (1938, April). Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant. *CA Vieweg & Zn*, 16. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRANM02:000035284:mpeg21:a0132>
- Arsip Nasional Republik Indonesia*. (1983).
- Atria, I. P. U. E. dan S. P. (1940, January). Judul Perempuan dan Komunitas; majalah bulanan Asosiasi Belanda untuk Kepentingan Perempuan dan Kewarganegaraan yang Setara, vol. 11, 1940, no. 1, 01-01-1940. *Van StockumDen Haag*, 5. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMALET01:000463001:00011>
- Dicky Eko Prasetyo. (2024). *Sistem Pemerintahan Presidensial, Parlementer, dan Campuran*. 47.
- Elsa Manora Simaremare, D. (2025). Peran Strategis Perempuan dan Pemuda Dalam Sumpah Pemuda 1928: Sebagai Tinjauan Historis Inklusif. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(307). [file:///C:/Users/acer/Downloads/1032_Elsa+Manora+Simaremare,+Shintya+Simamora,+Winda+Nidarwati+Gulo,+Adolf+Tarigan,+Puteri+Atikah+_jurnal_perempuan\[1\]\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/1032_Elsa+Manora+Simaremare,+Shintya+Simamora,+Winda+Nidarwati+Gulo,+Adolf+Tarigan,+Puteri+Atikah+_jurnal_perempuan1.pdf)
- Fazriani Putri Utami, Fatiyah, H. S. (2025). Maria Ulfah: Jejak Hukum Perempuan dalam Membangun Bangsa Indonesia, 1938–1973. *Jurnal El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 6(2), 131. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/eltarikh/index>

- Gadis Rasyid. (1985). *Maria Ullfah Subadio Pembela Kaumnya* (Cetakan Ke). N.V. Bulan Bintang.
- Hallerman, J. (1934, February). Pos Sumatra. *Medan*, 3. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011023617:mpeg21:p005>
- Hanna Noviana, S. H. (2025). Peran Maria Ulfah Santoso Dalam Pergerakan Perempuan Indonesia Melalui Organisasi Kowani Pada Tahun 1928-1962. *Mashlahah: Journal Of Islamic Economics*, 4(1), 34-35. <https://jurnal.darussalamuniversity.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/80/70>
- Hestirani, L. (2020). PEMIKIRAN MARIA ULLFAH SANTOSO TENTANG HAK PILIH PEREMPUAN INDONESIA (1938-1941)). *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(2). <https://doi.org/10.33652/handep.v3i2.104>
- Institut NIOD untuk Studi Perang, Holocaust, dan G. (1947). Arus Baru. *Amacab*, 1. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMNIOD04:000100373:mpeg21:p001>
- Institut Tropis Kerajaan (KIT)*. (1938). <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010865149:mpeg21:p003>
- Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*. (1955).
- Jurnal Perdagangan Untuk Hindia Belanda. (1936, April). *Utgave van de N.V. Publiciteits. Sn*, 1. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000463089:mpeg21:p00001>
- Kurir Limburg baru; Perusahaan penerbitan Limburgs Dagblad. (1946). *Surat Kabar Harian Limburg. Heerlen*. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010416300:mpeg21:p001>
- Mohamad Cholid, D. (1988). Maria Ulfah Kekasih Abadi Soebadio. *Jakarta*, 109.
- MPB. Manus dkk. (1933). *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (p. 111).
- MPB. Manus dkk. (1993). *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Zulfikar Ghazali (Ed.); Vol. 1).
- Nana Setialaksana. (2017). Peranan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1945 Dalam Proses Menuju Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Artefak History Dan Education*, 4(2), 155.
- Perpustakaan Kerajaan C 96. (1941). Surat Kabar Batavia. *Kolf & Co. (Batavia)*, 1. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011221713:mpeg21:p003>
- Saint Melania WerkNijmegen, D. (1936, January). Daun Santa Melania; organ Asosiasi "Sint Melania-Werk." *Universitas Radboud Nijmegen*, 97. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKDC07:006544007:00001>
- Saputra, S. (2025). *Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975* [Peran Maria Ulfah dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 1934-1975]. <https://repositori.unsil.ac.id>
- Selvia Adriani, S. T. M. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Of Practice Learning and Educational Development* <https://Digitalpress.Gaes-Edu.Com/Index.Php/Jpled>, Vol 4, No. 2, 131.

- Shelita Bunga Apriyana. (2022). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 1(1), 2. <https://doi.org/DOI: 10.58540/jipsi.v1i1.17>
- Sijthoff, A. . (1938). *Rotterdamsch Nieuwsblad*. Kota Rotterdam. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB32:164694027:mpeg21:p00023>
- Sondarika, W. (2017). Peranan Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. *Jurnal Historia*, 5(2), 215.
- Sumanto Al Qurtuby. (2018). *Perempuan dan Budaya Nusantara 2* (S. A. Q. & I. Lattu (Ed.); 11th ed.). Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)Press Perumahan Bukit Walisongo Permai, Jl. Sunan Ampel Blok V No. 11 Tambakaji- Ngaliyan-Semarang 5018.
- Surat kabar NV Rotterdamsch. (1946). Bredasche courant. *Surat Kabar NV Rotterdamsch*, 1. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAB03:000068691:mpeg21:a0003>
- Susilo, A. (2018). Pengaruh Politik Etis dan Pengaruh Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal HISTORIA*, 6(2), 407. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/94091482/pdf-libre.pdf?1668223062=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPolitik_Etis_Dan_Pengaruhnya_Bagi_Lahirnya.pdf&Expires=1765771431&Signature=QbpI-i-rJmEqEpPi1lcUrp3Z41uSdrQjp17UE9Olyvn3rN-m3Hs-TUjZuzGR1RoA-wwsR5KTJLu15YgJmpbm4BOwWCoUtyoYfX1DmIUVN-ZXi3bcgOsQPowhgZY6dkyMgb-0XKONiEN5BeiCFxwxhc3JX2mK7zX1C9jeOIFla7WgYPwG5Fr0sSAAlWbH76g8fR902czg2PknFOckzk0INjnmPN8EVjo-4tTjCe5ELpqX-t9uoJnGBj372eONngkozfbXIOBT9imExPNXmjVn6rByNxMcfXa8At3508oedTMDgKv-pGqlDs-igzk15KZDuDTTRp2GcSoG1DqcylzrA_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Suwigyo, A. (2012). *The Breach In the Dike: Regime Change Standardization of Public Primary-School Teacher Training In Indonesia (1893-1969)*. Disertasi, Universitas Leiden.
- Terry Irenewaty dan Winda Prasetyaning Adhi. (2016). Eksistensi Perjuangan Wanita Pada Masa Kolonial. *Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNY*, 11(2), 14.
- The People's Daily: surat kabar harian untuk Belanda*. (1938). <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010474355:mpeg21:p002>
- Winarmo dkk. (2014). *Seri Pendidikan Politik I: Pancasila dan UUD NKRI 1945*. Ombak.
- Yakutati Ismatillah L. (2018). *Peran Maria Ullfah di Bidang Sosial Keagamaan*. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- YPR.Achmad. (2023). *Peran Maria Ullfah Pada Pentas Politik Nasional Indonesia Tahun 1935 -1973*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.